

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR NOMOR: W4.TUN-1/ 50 /OT.01.1/I/2020 TENTANG

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

#### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR,

#### Menimbang

- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki komitmen dalam rangka mempercepat upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani;
- Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas diperlukan adanya suatu Rencana Kerja sebagai acuan dalam pembangunan Zona Integritas demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
- 6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

MAKASSAR;

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja Pembangunan

Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada setiap Ketua masing-masing Kelompok

Kerja pada Tim Pembangunan Zona Integritas untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas ini dengan sebaik-baiknya pada Kelompok Kerjanya masing-masing serta melaporkan setiap proses kemajuan dan kendala yang terjadi kepada Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Makassar Pada Tanggal : 13 Januari 2020

KETUA,

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

NIP. 19640816 199103 1 003

Lampiran :

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : W4.TUN-1/50 /OT.01.1/I/2020

Tanggal: 13 Januari 2020

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

#### A. DASAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

- Rencana kerja pembangunan yang di maksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM); dan
- 2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tiindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

#### C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

## I. Manajemen Perubahan

#### Indikator:

a. Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- 1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- 2. Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
- b. Dokumen Rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:

- 1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- 2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- 3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan dan memadai.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di rencanakan.
  - 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

- 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
- d. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut;

- 1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas.
- 3. Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola pikir.
- 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perubahan;

### Target:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundangan-undangan.

### II. Penataan Tata Laksana

#### Indikator:

### a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi ;
- 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan;
- 3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

#### b. E-Office /e-goverment

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu

- 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
- 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
- 3) Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi informasi.

#### c. Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan :
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

#### Target:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

# III. Penataan Sistem Manajemen SDM Indikator:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
  - 1) Pengadilan telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
  - 2) Pengadilan telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya ;
  - 3) Pengadilan telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

#### b. Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
- 2) Pengadilan telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal;
- 3) Pengadilan telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
  - 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity building / transfer knowledge*);
  - Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

#### d. Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- 2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
- 3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
- 4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan;
- f. Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

## Target:

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

# IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Indikator :

a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan.

Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:

- 1) Pengadilan telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
- 2) Pengadilan telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja;
- 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini:
  - 1) Pengadilan telah memiliki dokumen perencanaan ;
  - 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
  - 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
  - 4) Pengadilan telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
  - 5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
  - 6) Pengadilan telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

#### Target:

- a. Meningkatnya kinerja Pengadilan;
- b. Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan.

## V. Penguatan Pengawasan Indikator :

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
- 2) Pengadilan telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
  - 1) Pengadilan telah membangun lingkungan pengendalian;
  - 2) Pengadilan telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
  - Pengadilan telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
  - 4) Pengadilan telah mengkomunikasikan dan mengimplemen-

tasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

#### c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik(website);
- 2) Pengadilan telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat ;
- 3) Pengadilan telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ;
- 4) Pengadilan telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

#### d. Whistleblowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah menerapkan whistleblowing system;
- 2) Pengadilan telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*;
- 3) Pengadilan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistleblowing system.

#### e. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan ;
- 2) Pengadilan telah melakukan sosialiasi penanganan benturan kepentingan ;
- 3) Pengadilan telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan ;
- 4) Pengadilan telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan ;
- 5) Pengadilan telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

#### Target:

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran PENGADILAN

## VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Indikator :

#### a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) Pengadilan telah memaklumatkan standar pelayanan
- 3) Pengadilan telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
- 4) Pengadilan telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

### b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- Pengadilan telah memiliki sitem reward and punishment bagi pelaksana layanan lakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- 2) Pengadilan telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- 3) Pengadilan telah memiliki sarana layanan terpadu/ terintegrasi
- 4) Pengadilan telah melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan secara on-line ;
- c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ;
- 2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses terbuka;
- 3) Pengadilan telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

#### Target:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah
   ;
- b. Meningkatnya jumlah perorangan atau perusahaan mengurus izin usahanya
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

### D. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran:

- 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
  - a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal); dan
  - b. Presentasi penyelesaian TLHP.
- 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Sasaran terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan survey eksternal.

Ditetapkan : di Makassar <u>Pada Tanggal : 13 Januari 2020</u>

nnc

KETUA\_\_

JAMRES SARAAN, S.H., M.H. NIP. 19640816 199103 1 003

#### JADWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PTUN MAKASSAR

#### **TAHUN 2020**

4 Terpublikasinya kesiapan PTUN Makassar dalam Pembangunan Zona Integritas	5  1. Ikrar bersama Aparatur PTUN Makassar  2. Penandatanganan Naskah Ikrar bersama (Naskah Perjanjian)	9 <b>V V</b>	<b>FEB</b> 7	MAR 8	APR	<b>MEI</b> 10	<b>JUN</b> 11	JUL 12	<b>AGU</b> 13	<b>SEP</b> 14	<b>OKT</b> 15	<b>NOV</b>	<b>DES</b> 17	18
Terpublikasinya kesiapan PTUN Makassar dalam Pembangunan	Ikrar bersama     Aparatur PTUN     Makassar      Penandatanganan     Naskah Ikrar bersama     (Naskah Perjanjian)	v	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
kesiapan PTUN Makassar dalam Pembangunan	Aparatur PTUN Makassar  2. Penandatanganan Naskah Ikrar bersama (Naskah Perjanjian)													
	Naskah Ikrar bersama (Naskah Perjanjian)	v												
	Penandatanganan     Pakta Integritas     seluruh aparatur     PTUN Makassar	v												
	Penandatanganan     Piagam Pencanangan     Pembangunan Zona     Integritas	v												
kesiapan lingkungan PTUN Makassar menjadi wilayah Zona Integritas	Penyampaikan     Kebijakan Ketua     PTUN Makassar     tentang batas     kebolehan dan     larangan dalam     pelaksanaan tugas	v												
1	kesiapan lingkungan PTUN Makassar menjadi wilayah	Integritas  I Terwujudnya kesiapan Kebijakan Ketua PTUN Makassar tentang batas kebolehan dan Jarangan dalam	Integritas  I Terwujudnya tesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah Zona Integritas Integritas Integritas	Integritas  I Terwujudnya tesiapan Kebijakan Ketua PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah Zona Integritas Integritas  Integritas  1. Penyampaikan Ketua PTUN Makassar tentang batas kebolehan dan Iarangan dalam	Integritas  I Terwujudnya 1. Penyampaikan kesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah kebolehan dan Zona Integritas larangan dalam	Integritas  I Terwujudnya 1. Penyampaikan kesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah kebolehan dan Zona Integritas larangan dalam	Integritas  I Terwujudnya 1. Penyampaikan kesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah Zona Integritas larangan dalam	Integritas  I Terwujudnya 1. Penyampaikan kesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah kebolehan dan Zona Integritas larangan dalam	Integritas  I Terwujudnya 1. Penyampaikan kesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah kebolehan dan Zona Integritas larangan dalam	Integritas  I Terwujudnya 1. Penyampaikan kesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah kebolehan dan Zona Integritas larangan dalam	Integritas  I Terwujudnya 1. Penyampaikan kesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah kebolehan dan Zona Integritas larangan dalam	Integritas  I Terwujudnya 1. Penyampaikan kesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah Zona Integritas larangan dalam	Integritas  I Terwujudnya 1. Penyampaikan kesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah kebolehan dan Zona Integritas larangan dalam	Integritas  I Terwujudnya 1. Penyampaikan kesiapan Kebijakan Ketua lingkungan PTUN Makassar tentang batas menjadi wilayah kebolehan dan Zona Integritas larangan dalam

				Melakukan sosialisasi     Pembangunan Zona     Integritas kepada     seluruh ASN     Pengadilan melalui     rapat bulanan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
3.	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang	Penyusunan Tim Kerja	Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di PTUN Makassar	Menentukan ASN dan     Hakim Pengadilan     yang menjadi Tim     Kerja;	v												
	Manajemen Perubahan		F I UN WIAKASSAI	2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PTUN Makassar;	v												
		Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas di PTUN Makassar	Menyusun Rencana     Kerja Pembangunan     Zona Integritas dalam     bentuk Surat     Keputusan Ketua     PTUN Makassar;	v												
				2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PTUN Makassar;	v												
				3. Mensosialisasikan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di PTUN Makassar;	v			v			v			v			

Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Zona Integritas	Terlaksanakanya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di	1.	Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas;	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
Zona integritas	PTUN Makassar	2.	Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi;	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
		3.	Melaporkan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi;	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja ASN PTUN Makaassar	1.	Menjadikan pimpinan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;													Setiap saat
		2.	Menetapkan hakim dan/ atau pegawai sebagai agen perubahan (SK Agen Perubahan);	v												
		3.	Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)													Setiap saat
		4.	Melibatkan semua ASN PTUN Makassar dalam Pembangunan Zona Integritas;													Setiap saat
		5.	Pembangunan sarana dan prasarana berupa untuk terwujudnya area/zonasi steril;	v	v	v	v	v	v							

4.	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di PTUN Makassar	Membuat SOP yang mengacu kepada proses bisnis di PTUN Makassar;				Setiap saat sesuai usuluan kebutuhan organisasi
	Tatalaksana	Otama	iviakassai	Menerapkan SOP secara konsisten;				Setiap saat
				Mengevaluasi SOP     dan menindaklanjuti     hasil evaluasi				Setiap saat sesuai usuluan kebutuhan organisasi
		E-Office	Meningkatnya pengguna teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen	Mengoptimalkan     Penggunaan Aplikasi     Elektronik Pengelolah     Data Laporan dan     Layanan dari     Mahkamah Agung dan     Kementerian terkait				Setiap saat
			папајетет	Mengoptimalkan     Penggunaan Aplikasi     Elektronik Monitoring     Implementasi SIPP     Dirjen Badilmiltun				Setiap saat
				3. Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Elektronik Pengelola Data dan Layanan Inovasi PTUN Makassar				Setiap saat
				Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi;	v	v	v	Melalui Hawasbid
		Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya kemudahan masyarakat untuk	Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dengan adanya PID, meja informasi,				Setiap saat

			mendapatkan informasi dari PTUN Makassar	website, publikasi putusan (Direktori Putusan), dll;													
				2. Membuat brosur dan banner tentang keterbukaan informasi di pengadilan kepada publik termasuk di website;	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
				3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di PTUN Makassar;	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
5.	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di bidang Penataan	Perencanaan Kebutuhan Pegawai yang sesuai Kebutuhan Organisasi	Meningkatnya efektifitas SDM Aparatur pada PTUN Makassar	Membuat rencana kebutuhan pegawai di PTUN Makassar dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;	v												
	Sistem Manajemen SDM	Organisasi		Membuat analisis     beban kerja pegawai di     PTUN Makassar;													Sesuai TPM
		Pola Mutasi Internal	Meningkatnya efektifitas menejemen SDM aparatur PTUN Makassar	Melaksanakan mutasi internal terhadap pegawai dengan mempertimbangkan kompetensi dan diformalkan dengan keputusan.	v												
				Menerapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan	v												Sesuai TPM

		Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal;		v	v	v		v	
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur PTUN Makassar	Mengusulkan aparatur PTUN Makassar untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi non klasikal;							Dilaksanakan setiap ada permintaan pelatihan
		Melakukan upaya     pengembangan     kompetensi non     klasikal;							Sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi
		3. Mengusulkan dan merekomendasikan aparatur PTUN Makassar untuk mendapatkan sertifikasi di bidang tugas masing-masing;							Mengusulkan bila ada pemanggilan diklat
Penetapan kinerja individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada	Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur PTUN Makassar;	v						
	aparatur PTUN Makassar	Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya;	v						Setiap Tahun
		3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;							Setiap Bulan

				4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu;	v	v	v	v		
		Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode perilaku pegawai	Meningkatnya Disiplin SDM aparatur pada PTUN Makassar	Membuat absensi     pegawai dengan     fingerprint (sidik jari)/     face ID dan menginput     data absensi di     Komdanas;						Setiap Hari Kerja
		pogawai		Membuat surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar;						Setiap dinas luar
				3. Membuat surat izin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari;						Setiap izin
		Sistem informasi kepegawaian	Meningkatnya transparasi dan keakuratan data kepegawaian aparatur PTUN Makassar	Memutakhirkan data kepegawaian aparatur PTUN Makassar secara berkala pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP);						Setiap ada perubahan data
6.	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Akuntabilitas	Keterlibatan pimpinan	Meningkatnya kinerja pada aparatur PTUN Makassar	Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan						Dilaksakan setiap ada permintaan usulan anggaran
	Kinerja			Melibatkan secara     langsung pimpinan     pada saat penyusunan     penetapan kinerja					v	

				Memantau pencapaian kinerja secara berkala	v		v			Dilaksanakan pada bulan Januari dan bulan Juli
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur PTUN Makassar	Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil						Mulai dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Januari 2019
				Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART	v					
				Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat tentang informasi tentang kinerja						Setiap Bulan
				4. Mengikutsertakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja						Setiap ada permintaan pelatihan
				5. Menetapkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja						
7.	Mewujudkan Terciptanya Komponen Pengungkit di bidang	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur PTUN Makassar	Membuat kampanye publik (public campaigin) tentang pengendalian gratifikasi						Setiap saat dan telah dimulai dari Tahun 2018
	Penguatan Pengawasan			Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi di PTUN Makassar	v				v	Dilakukan pada bulan Januari dan bulan Desember

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara	Membangun     Pengendalian di     Lingkungan     Pengadilan Tata     Usaha Negara     Makassar	v			
	dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	Melakukan penilaian     Resiko atas     Pelaksanaan     Kebijakan di PTUN     Makassar				Dilakukan jika terdapat indikasi resiko
		Melakukan     pengendalian untuk     meminimalisir resiko     yang telah diidentifikasi				Setiap saat
		4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur PTUN Makassar mengenai Sistem Pengendalian Intern				Disampaikan setiap rapat bulanan
Pengaduan masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan	Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di PTUN Makassar				Setiap Peristiwa
	wewenang di PTUN Makassar	Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat				Setiap Peristiwa
		Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat				Dilaksanakan jika terdapat pengaduan

		4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Dilaksanakan jika terdapat pengaduan
Whistle- Blowing System	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di PTUN	Menerapkan dan mempublikasikan Whistle-Blowing System di PTUN Makassar	Setiap saat
	Makassar	Mengevaluasi     penerapan Whistle -     Blowing System	Setiap saat
		Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System	Setiap ada temuan
Penanganan Benturan Kepentingan	Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan	Mengindetifikasikan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Setiap saat
	tugas dan fungsi di PTUN Makassar	Sosialisasi     penanganan benturan     kepentingan;	Disampaikan setiap rapat bulanan
		Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan	Dilaksanakan jika terdapat benturan
		Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Dilakukan jika terdapat benturan
		5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Dilakukan jika terdapat benturan

8.	Mewujudkan terciptanya Komponen pengungkit di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan	Standar Pelayanan	Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di PTUN Makassar	Membuat kebijakan standar pelayanan di PTUN Makassar      Mempublikasikan standar pelayanan di PTUN Makassar	v			Telah dilaksanakan melalui media online maupun
	Publik			Membuat SOP untuk     pelaksanaan standar     pelayanan di PTUN     Makassar				offline  SOP terkait telah tersedia
				Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di PTUN Makassar	v			
		Budaya Pelayanan Prima	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih	Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan Budaya Pelayana Prima di PTUN Makassar				Disampaikan setiap rapat bulanan
			murah, dan lebih mudah dijangkau di PTUN Makassar	Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat di akses melalui berbagai media				Telah dilaksanakan melalui media online
				3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta memberikan konpensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar				Telah dibuat

				4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di PTUN Makassar								Telah dibuat
		Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan	Melakukan survey     kepuasan masyarakat     terhadap pelayanan di     PTUN Makassar								Setiap saat / hari kerja
			pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara	Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakases secara terbuka		v	v		v		v	
				Menindaklanjuti atas     hasil survey kepuasan     masyarakat terhadap     pelayanan di PTUN     Makassar	v	v		v		v		
9.	Mewujudkan Indikator Hasil dibidang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Nilai Persepsi Korupsi	Terwujudnya aparatur PTUN Makassar yang berbasis dan Bebas KKN	Memfasilitasi     Pelaksanaan survey     eksternal di PTUN     Makassar yang     dilaksanakan oleh     instansi yang     berwenang								Telah memberikan fasilitasi terhapda instansi terkait
		Presentase penyelesaian TLHP	Terwujudnya penyelesaiann Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di PTUN Makassar	Melakukan tindak lanjut atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di PTUN Makassar								Dilaksanakan jika terdapat pengaduan
10.	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di PTUN Makassar yang akan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang								Telah memberikan fasilitasi terhapda instansi terkait